



News Title : Pemerintah dan Swasta Sepakat Indonesia jadi Acuan Harga CPO Global	
Media Name : republika.co.id	Journalist : Lida Puspaningtyas
Publish Date : 03 March 2023	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 3,000,000
Resources : Dwi Sutoro (Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Kabul Wijayanto (Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)), Rahmanto Amin Jatmiko (Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN))	Ads Value : 1,000,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : sawit

Pemerintah dan Swasta Sepakat Indonesia jadi Acuan Harga CPO Global

Acuan dikaji pada proses CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka.

Republika.co.id



kebun sawit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan pelaku usaha sepakat membangun rujukan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global melalui pengembangan bursa komoditas yang melibatkan transparansi di dalam negeri.

Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Dwi Sutoro di Jakarta, Jumat (3/3/2023), mengatakan pengembangan bursa CPO Indonesia menjadi sangat penting untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar sawit di dalam negeri.

Eksa Juga

Mengenal lebih dalam mengenai sawit Indonesia	Review CPO Level Bursa BPDPS Membangun Sistem Data Sawit Nasional	Harapan Berkomite Masyarakat Sawit Koridor 14 Dolar AS per ton
---	--	---

"Saat ini, Indonesia sudah menggunakan rujukan harga CPO dari Bursa Minyak (MCO) dan Bursa Rotterdam di Belanda. Dengan menggunakan bursa di luar negeri kadang memberikan dampak bagi keseimbangan penawaran dan permintaan di dalam negeri," ujarnya di Jakarta.

Menurut dia, saat ini di Indonesia, belum ada bursa komoditas yang mampu menggantikan tiga fungsi yaitu price discovery atau penentuan harga, price reference atau acuan harga dan hedging atau lindung nilai.



Karena itu, Dwi mengusulkan kepada pemerintah supaya dapat memanfaatkan skema perdagangan CPO yang sudah ada seperti KPBN di kawasan Perkebunan Bersama Nusantara. Strategi ini menjadi sangat penting apabila Kementerian Perdagangan ingin mengklarifikasi target penentuan harga acuan CPO pada Juni mendatang.

Dal menjelaskan bursa CPO sebenarnya mempunyai tiga fungsi yaitu "price discovery" (penentuan harga), "price reference" (acuan harga) dan "hedging" (lindung nilai), dari sebuah proses yang adil, efisien, transparan, dan terprediksi.

"Upasan membangun tata naga komoditi CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus didukung dan dilakukan sebagai langkah untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia," ujarnya dalam Seminar Sawit Indonesia bertajuk "Strategi Indonesia Menjadi Harga CPO Dunia".

Kelanjutan pemerintah, BUMN dan swasta, lanjutnya, diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendobrak tata naga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terprediksi.

Sementara itu Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan strategi pembentukan harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun kedaulatan industri sawit di dalam negeri.

Oleh karena itu, Bappebti sedang menyiapkan aturan baru yang akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka di Indonesia.

Aturan tersebut sudah digodak dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan domestik, nilai ekspor (EAO) dan ekspor. Lalu, akan dikaji pada proses CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya mekanisme bursa untuk menfasilitasi perdagangan.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabul Wijayanto menyatakan sepakat dengan adanya acuan harga komoditas CPO Indonesia yang diharapkan dapat dijadikan acuan harga sawit global.

Selain itu, menurut dia, Harga Acuan Komoditas yang sudah ditetapkan dapat menjadi acuan pangambil kebijakan memandirikan BPDPS dalam menyiapkan rencana bisnis program.

Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Rahmanto Amin Jatmiko mengatakan KPBN sudah punya persyaratan kebun bursa yang mengizinkan untuk secara resmi dijadikan sebagai bursa CPO Indonesia dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan bursa yang lain atau mewajibkan bursa yang baru.

Harga CPO KPBN, lanjutnya, telah menjadi acuan harga patokan 100 prosen dari seluruh harga di seluruh dunia juga jadi acuan harga oleh Omdax, India, Gapek, Bloomberg Intelligence, Anydesk, Kencana dan Mervin.

Selain itu, menurut dia, bursa harian yang dijalankan di KPBN sudah dibuat sejak 1998 dan sudah diawasi oleh BPHH pada 2011.

KPBN adalah anak perusahaan dari PTPN sehingga bisa menjadikan diri sebagai sebuah korporasi yang profesional maupun lebih untuk kepentingan nasional sesuai amanah pemerintah," ujar Rahmanto.